



Menolak Suap, Menjaga Integritas: Tanggung Jawab Setiap Profesional

Nayla Jasmine Sabrina, Shelma Anrika Dwiyanti

Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia.

Korespondensi penulis: Email : jasminessabrina@nayla@gmail.com

Abstract. *Bribery is a serious threat to integrity and professional ethics across various fields of work. This article discusses the importance of rejecting bribery as a demonstration of commitment to professional integrity. Using a qualitative approach through literature review and case analysis, this paper highlights how integrity serves as a core pillar in maintaining public trust, promoting transparency, and strengthening work ethics. Every professional bears a moral and legal responsibility to refuse any form of bribery and to foster a clean, high-integrity work culture. The article also offers prevention strategies and ways to instill integrity values in professional environments as concrete steps toward positive change.*

Keywords: *Integrity, Professionalism, Ethics, Bribery, Moral Responsibility*

Abstrak. Praktik suap merupakan ancaman serius terhadap integritas dan etika profesional di berbagai bidang pekerjaan. Artikel ini membahas pentingnya penolakan terhadap suap sebagai bentuk komitmen terhadap integritas profesional. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus, artikel ini menyoroti bagaimana integritas menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik, mendorong transparansi, dan memperkuat etos kerja. Setiap profesional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menolak segala bentuk suap, serta membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas tinggi. Artikel ini juga menawarkan strategi pencegahan dan penanaman nilai integritas dalam lingkungan profesional sebagai langkah konkret menuju perubahan positif.

Kata Kunci: Integritas, Profesionalisme, Etika, Suap, Tanggung Jawab Moral

LATAR BELAKANG

Korupsi telah menjadi masalah klasik namun tetap relevan untuk dibahas hingga saat ini. Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling kompleks dan merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya sekadar tindakan penyimpangan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, melainkan telah menjadi ancaman nyata

bagi fondasi ekonomi, stabilitas sosial, serta keadilan dalam masyarakat¹. Kejahatan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran sudah sangat meresahkan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran merupakan musuh masyarakat yang harus segera diberantas demi lancarnya kemajuan bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas².

Dalam menjalani dunia profesional, setiap individu pasti dihadapkan pada berbagai pilihan yang menguji prinsip dan nilai diri. Salah satu ujian paling nyata adalah godaan untuk menerima suap. Meskipun mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju keuntungan pribadi atau kemudahan tertentu, menerima suap sebenarnya membuka pintu pada banyak risiko baik secara hukum, moral, maupun reputasi³. Menolak suap bukan hanya tentang menaati aturan, tapi juga soal menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap profesi yang dijalani. Ketika seseorang memegang teguh integritas, ia sedang membangun kepercayaan baik dari rekan kerja, klien, maupun masyarakat luas⁴.

Dalam lingkungan kerja yang sehat, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi harus terus dijaga dan ditanamkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap profesional untuk menyadari (Purba et al., 2020) bahwa menjaga integritas bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab yang melekat pada profesinya. Sikap tegas dalam menolak suap adalah langkah nyata dalam menjaga martabat dan kepercayaan terhadap dunia kerja yang profesional dan beretika⁵.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh individu dan organisasi untuk menolak suap?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami pandangan, sikap, dan upaya para profesional dalam menolak suap serta menjaga

¹ Arifin, Syamsul. 2014. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

² Andi, M. (2018). Korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

³ Budi, Y., & Sumarno, P. (2017). "Pengaruh Pendidikan Integritas terhadap Sikap Menolak Suap." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 5(4), Hal 312-328.

⁴ Nailatul. Rahmadhani. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. Universitas Trunojoyo Bangkalan.

⁵ GRC Indonesia. (2024). Mari Lawan Suap: Laporkan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi ... GRC Indonesia.

integritas di lingkungan kerja. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi.

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan kepada narasumber dari dengan latar belakang profesi, seperti pegawai negeri. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tema penelitian. Wawancara bertujuan menggali pengalaman pribadi, pandangan mereka tentang suap, serta tantangan dan strategi dalam menjaga integritas.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan, seperti:

- a. Artikel jurnal ilmiah tentang korupsi
- b. Berita dari media massaDokumen pemerintah atau undang-undang terkait pemberantasan korupsi⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penyusunan.
- b. Analisis dokumen, yaitu menganalisis isi dari dokumen resmi, laporan tahunan, serta publikasi dari lembaga terkait⁷.

4. Teknik Analisis Data

- a. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara reduksi data (memilih informasi yang relevan), penyajian data (disusun secara sistematis), dan penarikan kesimpulan.
- b. Peneliti akan menghubungkan informasi yang ditemukan dengan teori atau konsep yang ada agar dapat menjawab keempat rumusan masalah secara logis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Suap dan Kaitannya dengan Integritas Profesional

Suap dapat diartikan sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada seseorang yang memiliki wewenang, dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakannya demi keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini mencakup

⁶ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2021). Panduan Menjaga Integritas dan Mencegah Suap. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ Lubis, T. M. (2010). Korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: LP3ES.

penerimaan hadiah, uang, atau fasilitas sebagai imbalan atas perlakuan istimewa atau penyalahgunaan jabatan, yang jelas melanggar aturan dan norma berlaku⁸.

Integritas profesional merupakan pilar utama dalam dunia kerja, merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya. Ini adalah wujud kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk bertindak adil serta objektif, bahkan dalam situasi sulit. Profesional yang berintegritas selalu berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan standar etika profesinya.

Membayar atau menerima Suap, baik yang dibayarkan atau diterima secara langsung maupun tidak langsung, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Suap dapat berupa uang atau barang berharga lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan suatu Pihak Ketiga secara tidak patut⁹. Suap juga mencakup pembayaran atau hadiah sebagai imbalan atas tindakan yang tidak patut dari suatu Pihak Ketiga. Suap tidak perlu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai korupsi, menawarkan atau menerima suap secara umum sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Suap secara langsung mengancam integritas profesional karena praktik ini mendorong individu untuk mengabaikan prinsip kejujuran dan objektivitas demi keuntungan sesaat. Ketika seorang profesional menerima suap, ia telah mengkompromikan nilai etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional dan adil, melainkan dipengaruhi oleh imbalan yang diterima¹⁰.

Upaya Individu Menolak Suap: Memperkuat Kompas Moral Pribadi

Moralitas suatu tindakan bisa dinilai dari dampaknya terhadap orang lain. Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau gangguan, maka bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik. Selain itu, niat yang mendasari tindakan juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian moral. Korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan¹¹. Langkah pertama menolak suap adalah memperkuat kompas moral. Ini berarti terus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam diri sendiri. Ketika prinsip kita kuat, kita akan lebih tahan terhadap godaan untuk

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Kasus Suap Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

⁹ Prasetyo, A. & Ramadhan, D. (2021). "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Suap di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(1), Hal 45-59.

¹⁰ Saputra, Adi (2024). *Kebijakan Antisuap dan Anti Korupsi*. Hal.1-12

¹¹ Siregar, F. H. (2019). "Fenomena Suap dalam Perspektif Hukum dan Etika". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), Hal 250-266.

mengambil jalan pintas melalui cara-cara tidak etis. Kompas moral yang terasah menjadi benteng pertahanan utama menghadapi tawaran menggiurkan namun salah¹².

Lakukan refleksi diri secara rutin untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Kenali nilai-nilai pribadi kita dan bagaimana nilai tersebut memandu Tindakan kita sehari-hari. Dengan pemahaman diri yang baik, kita akan lebih cepat mengenali potensi konflik moral ketika dihadapkan pada tawaran suap. Kesadaran ini membantu mengambil keputusan yang konsisten dengan integritas pribadimu dan menolak godaan¹³.

Teruslah belajar mengenai etika profesi dan isu integritas. Baca buku, ikuti seminar, atau berdiskusi dengan rekan yang kamu percaya menjunjung tinggi nilai moral. Pengetahuan ini akan mempertajam pemahaman tentang batasan benar dan salah dalam dunia kerja. Dengan bekal ini, kompas moral kita akan semakin kuat dan membantu kita menavigasi situasi sulit dengan lebih bijaksana¹⁴.

Strategi Individu: Mengembangkan Ketegasan untuk Berkata Tidak pada Suap

Kembangkan ketegasan diri untuk menolak tawaran suap secara langsung dan tanpa ragu. Latih cara menyampaikan penolakan dengan jelas, sopan, namun tegas. Kita bisa katakan, "Mohon maaf, saya tidak bisa menerima ini karena bertentangan dengan etika profesional saya." Menetapkan batasan yang jelas sejak awal menunjukkan bahwa integritas kita tidak dapat dinegosiasikan oleh siapapun juga.

Persiapkan diri menghadapi situasi berisiko tinggi di mana tawaran suap mungkin muncul. Antisipasi skenario potensial dan siapkan respons penolakan yang sudah kita pikirkan matang-matang. Dengan kesiapan mental, kita tidak akan merasa tertekan atau bingung saat tawaran datang. Kemampuan kita merespons dengan tenang dan tegas akan lebih efektif jika sudah dipersiapkan sebelumnya.

Ingatlah selalu dampak negatif menerima suap dan keuntungan jangka panjang menjaga integritas. Setiap kali kita berhasil menolak, itu akan memperkuat keyakinan diri serta reputasi. Ketegasan kita adalah investasi berharga untuk karier yang bersih dan membanggakan. Konsistensi dalam menolak membangun citra profesional yang kuat dan dapat dipercaya oleh rekan kerja maupun atasan kita¹⁵

¹² Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Jakarta: Politeia.

¹³ Susanto, E. (2020). Etika Administrasi Negara. Bandung: Refika Aditama

¹⁴ Susi Amalia. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)

¹⁵ . Sustain.id. (2021). (Seri ISO 37001 ke-5) Whistleblowing System (WBS) dalam SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai Alat untuk Mendeteksi Adanya Indikasi Suap/Korupsi.

Pentingnya Mencari Dukungan dan Melaporkan Tawaran Suap

Saat kita menghadapi tawaran suap, jangan hadapi sendirian. Carilah dukungan dari rekan kerja yang dipercaya atau atasan yang berintegritas. Berbagi beban dan mendiskusikan situasi ini dapat memberikan perspektif baru serta kekuatan moral. Dukungan kolega membantu kita merasa tidak terisolasi dan lebih yakin dalam mengambil sikap menolak yang benar dan tepat.

Melaporkan tawaran suap adalah langkah krusial untuk melindungi diri dan integritas organisasi. Laporkan kejadian tersebut melalui saluran resmi yang tersedia, seperti sistem whistleblowing atau kepada bagian kepatuhan. Tindakan melaporkan menunjukkan komitmen kita pada etika dan membantu perusahaan mengidentifikasi serta mengatasi risiko korupsi secara lebih efektif di lingkungan kerja sekitar kita¹⁶.

Dengan mencari dukungan dan melaporkan, kita tidak hanya melindungi diri dari potensi masalah hukum dan etika, tetapi juga berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Langkah proaktif ini mengirimkan pesan kuat bahwa suap tidak ditoleransi. Ini membantu memperkuat budaya integritas perusahaan dan mencegah praktik serupa terjadi pada orang lain di masa depan.

Upaya Organisasi: Merancang dan Menerapkan Kebijakan Anti-Suap yang Efektif

Organisasi perlu merancang kebijakan anti-suap yang jelas dan komprehensif, mencakup definisi suap, larangan tegas menerima atau memberi, serta prosedur pelaporan. Kebijakan ini harus mudah dipahami oleh semua tingkatan karyawan, mulai dari staf hingga manajemen puncak. Pastikan kita tahu bahwa aturan ini berlaku untuk semua interaksi bisnis, termasuk dengan pihak ketiga seperti vendor atau konsultan.

Penerapan kebijakan anti-suap memerlukan sosialisasi yang efektif ke seluruh lapisan organisasi. Komunikasikan secara rutin melalui pelatihan, email, atau pertemuan agar setiap karyawan, termasuk kita, memahami pentingnya kebijakan ini. Pastikan semua orang tahu konsekuensi pelanggaran dan saluran pelaporan yang aman¹⁷. Implementasi yang baik menunjukkan komitmen serius perusahaan dalam memberantas praktik suap di lingkungan kerja.

Untuk memastikan efektivitasnya, organisasi harus memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala dan menegakkan sanksi secara konsisten bagi pelanggar. Audit internal atau eksternal dapat membantu mengidentifikasi celah. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap suap, sehingga kamu dan rekan kerja merasa aman bekerja dalam lingkungan yang berintegritas tinggi dan bersih dari korupsi¹⁸.

¹⁶ Stekom.ac.id. (2024). Peran Integritas dalam Membangun Kepercayaan Atasan di Dunia

¹⁷ Tempo.co. (2023). Kasus suap terbaru: modus, pelaku, dan penanganannya.

¹⁸ Zainudin, Hasan.2025. Pendidikan Anti Korupsi.Universitas Bandar Lampung : Lampung

Peran Organisasi dalam Memberikan Edukasi dan Pelatihan Anti-Suap

Pendidikan anti korupsi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan integritas anak bangsa. Urgensi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Organisasi memegang peran vital dalam membekali setiap karyawan, termasuk kita, dengan pemahaman mendalam tentang bahaya suap. Edukasi yang terstruktur membantu meningkatkan kesadaran akan risiko hukum dan reputasi.

Pengetahuan ini menjadi fondasi agar kita dan rekan kerjamu mampu mengidentifikasi potensi suap serta memahami mengapa menolaknya adalah pilihan terbaik demi kebaikan bersama. Pelatihan anti-suap yang efektif harus mencakup berbagai skenario praktis dan dilema etika yang mungkin dihadapi. Melalui studi kasus, simulasi, atau diskusi kelompok, kita dilatih mengenali modus suap dan cara menanggapinya dengan tegas namun profesional. Keterampilan ini penting agar kita tidak ragu mengambil sikap benar saat berhadapan langsung dengan tawaran menggiurkan tersebut.

Ketika integritas moral aparaturnegara melemah, keputusan-keputusan ekonomi yang seharusnya didasarkan pada prinsip kepentingan publik berubah menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu¹⁹. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim usaha, menurunkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus diiringi dengan penguatan integritas moral aparaturnegara sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Pemberian edukasi dan pelatihan ini idealnya dilakukan secara berkala agar pengetahuan kita selalu segar dan relevan. Organisasi perlu memastikan materi terus diperbarui sesuai perkembangan hukum dan praktik bisnis. Komitmen pada pelatihan berkelanjutan menunjukkan keseriusan perusahaan dalam membangun budaya integritas, mendukung kita dan seluruh tim untuk selalu bertindak etis dalam setiap situasi kerja.

Membangun Sistem Pelaporan (*Whistleblowing*) yang Aman dan Terpercaya

rendahnya kesadaran untuk memberikan laporan dan pembalasan atas laporan yang telah disampaikan juga menjadi penyebab mengapa korupsi/suap seringkali tidak dilaporkan atau terdeteksi dalam suatu organisasi. UNODC menyarankan salah satu elemen kunci dalam

¹⁹ Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati, Bambang Hartono. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang

menangani korupsi yaitu dengan mendorong dan melindungi orang-orang yang melaporkan informasi tentang dugaan kasus perilaku korupsi atau disebut dengan *Whistleblowing System* (WBS) dan untuk pelapor disebut sebagai *whistleblower*.

Organisasi perlu membangun sistem pelaporan atau whistleblowing agar kita dan rekan kerja merasa aman melaporkan dugaan suap tanpa rasa takut. Sistem ini menjadi saluran resmi untuk mengungkap pelanggaran etika dan potensi tindakan ilegal. Tujuannya adalah mendeteksi masalah sejak dini dan menjaga lingkungan kerja tetap bersih, serta menunjukkan komitmen perusahaan pada transparansi dan akuntabilitas tinggi. Sistem pelaporan yang efektif harus menjamin kerahasiaan identitas kita sebagai pelapor. Opsi untuk melapor secara anonim juga sangat penting guna mengurangi kekhawatiran akan tindakan balasan. Selain itu, perlu ada jaminan perlindungan hukum dan karier bagi pelapor dari segala bentuk intimidasi atau diskriminasi. Keamanan dan kepercayaan adalah kunci agar kita berani bersuara.

Perusahaan bertanggung jawab mengelola sistem pelaporan ini secara profesional dan independen. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang objektif, adil, dan tepat waktu. Komunikasi mengenai proses penanganan laporan, sejauh tidak mengganggu investigasi, penting untuk membangun kepercayaan. Respons yang cepat dan serius menunjukkan bahwa pelaporan kita benar-benar dihargai oleh organisasi. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan masyarakat dan pihak-pihak yang mengetahui adanya praktik korupsi atau suap dalam dunia hukum dapat melaporkannya tanpa rasa takut akan adanya balas dendam atau ancaman²⁰.

Mendorong Budaya Organisasi yang Menjunjung Tinggi Etika dan Menolak Suap

Pemimpin di organisasi kita memegang peran kunci dalam membentuk budaya etis. Teladan yang mereka tunjukkan, dari manajemen puncak hingga supervisor langsung, sangat berpengaruh. Jika pemimpin secara konsisten menolak suap dan mengutamakan integritas, kita dan rekan kerja akan termotivasi mengikuti jejak yang sama. Komitmen pemimpin adalah fondasi utama budaya kerja yang bersih dan beretika tinggi.

Budaya etis perlu ditanamkan dalam setiap aspek operasional harian organisasi. Mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, hingga promosi jabatan, nilai integritas harus menjadi pertimbangan utama²¹. Kita perlu melihat bahwa tindakan etis dihargai, sementara perilaku

²⁰ Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari Journal of Accounting Law Communication and Tehnology 1 (2), 308-315, 2024. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa

²¹ Zainudin Hasan. (2025). Buku Sistem Peradilan Pidana, Hal 264

menyimpang tidak ditoleransi. Pengakuan terhadap karyawan berintegritas akan memperkuat norma positif ini di lingkungan kerja.

Untuk membangun budaya menolak suap yang kuat, organisasi kita harus konsisten menegakkan standar etika tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai aturan, memberikan pesan jelas bahwa integritas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Kamu juga perlu melihat bahwa kejujuran dan etika kerja dirayakan, sehingga memperkuat motivasi bersama untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih.

Memahami Kerangka Hukum Nasional dan Internasional terkait Pemberantasan Suap

Penting bagi kita memahami bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum nasional yang kuat untuk memberantas suap. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara jelas mengatur sanksi pidana bagi pelaku suap, baik pemberi maupun penerima. Peraturan ini menjadi landasan utama penegakan hukum terhadap praktik koruptif yang merusak tatanan negara dan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem²².

Selain hukum nasional, kita juga perlu mengetahui adanya konvensi internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, menunjukkan komitmen global dalam memerangi korupsi lintas negara. Kerangka kerja internasional ini mendorong kerja sama antarnegara dalam pencegahan, penindakan, serta pengembalian aset hasil kejahatan korupsi yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Memahami kedua kerangka hukum ini, nasional dan internasional, memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang keseriusan isu suap. Ini membantu kita menyadari bahwa tindakan suap tidak hanya melanggar hukum di Indonesia, tetapi juga standar etika global. Pengetahuan ini memperkuat alasan kita untuk selalu menolak suap dan menjaga integritas profesional kita dalam setiap situasi kerja²³.

KESIMPULAN

Menolak suap bukan sekadar tindakan hukum semata, melainkan juga cerminan dari integritas pribadi dan profesional seseorang. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan penuh tekanan, godaan untuk melakukan pelanggaran etika seperti menerima suap bisa muncul dalam berbagai bentuk. Namun, di tengah tantangan tersebut, seorang profesional sejati dituntut

²² Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari *Journal of Accounting Law Communication and Tchnology* 1 (2), 308-315, 2024. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa .

²³ Zainudin Hasan, *Sol Justicia* 5 (2), 192, 2022. Tinjauan Kriminalogi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.

untuk tetap teguh menjaga nilai-nilai moral dan integritas yang menjadi dasar dari kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang dijalankannya. Integritas tidak dibangun dalam sehari. Ia adalah hasil dari kebiasaan, pilihan-pilihan kecil yang konsisten, dan komitmen terhadap prinsip yang benar meskipun tidak selalu mudah. Ketika seorang profesional menolak suap, sebenarnya ia sedang menjaga nama baik dirinya, institusinya, dan profesinya secara keseluruhan. Ia juga sedang menunjukkan bahwa keberhasilan dan prestasi dapat dicapai melalui cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2014. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi,M. (2018). Korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi, Y., & Sumarno, P. (2017). "Pengaruh Pendidikan Integritas terhadap Sikap Menolak Suap." Jurnal Pendidikan dan Sosial, 5(4), Hal 312-328.
- Nailatul. Rahmadhani. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. Universitas Trunojoyo Bangkalan.
- GRC Indonesia. (2024). Mari Lawan Suap: Laporkan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi ... GRC Indonesia.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2021). Panduan Menjaga Integritas dan Mencegah Suap. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lubis, T. M. (2010). Korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Kasus Suap Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst
- Prasetyo, A. & Ramadhan, D. (2021). "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Suap di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kriminologi, 5(1), Hal 45-59.
- Saputra. Adi (2024). Kebijakan Antisuap dan Anti Korupsi. Hal.1-12
- Siregar, F. H. (2019). "Fenomena Suap dalam Perspektif Hukum dan Etika". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), Hal 250-266.
- Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Jakarta: Politeia.
- Susanto, E. (2020). Etika Administrasi Negara. Bandung: Refika Aditama.
- Susi Amalia. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)

- Sustain.id. (2021). (Seri ISO 37001 ke-5) Whistleblowing System (WBS) dalam SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai Alat untuk Mendeteksi Adanya Indikasi Suap/Korupsi.
- Stekom.ac.id. (2024). Peran Integritas dalam Membangun Kepercayaan Atasan di Dunia
- Tempo.co. (2023). Kasus suap terbaru: modus, pelaku, dan penanganannya.
- Zainudin, Hasan.2025. Pendidikan Anti Korupsi.Universitas Bandar Lampung : Lampung
- Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati, Bambang Hartono. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang
- Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari Journal of Accounting Law Communication and Tehnology 1 (2), 308-315, 2024. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa
- Zainudin Hasan. (2025). Buku Sistem Peradilan Pidana, Hal 264
- Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. Tinjauan Kriminalogi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.
- Zainudin Hasan, A Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari Journal of Accounting Law Communication and Tehnology 1 (2), 308-315, 2024. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa .